

dan budaya, serta hukum dan kelembagaan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan HPK untuk Pembangunan Kawasan Industri OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung PSN Lapangan Abadi atas nama SKK Migas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Tim Terpadu tidak merekomendasikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kawasan Industri, karena permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan lingkup kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Masela dan pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagai kawasan industri;

4. Kepala SKK Migas dan Pjs. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dengan surat Nomor SRT-0516/SKKIA0000/2025/S9 tanggal 12 September 2025 dan Nomor SRT-0317/SKKIH0000/2025/S9 tanggal 24 September 2025 pada intinya menyampaikan bahwa areal permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukungnya tidak akan dilaksanakan pembangunan kawasan industri maupun industri lain namun diperuntukan untuk mendukung Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dengan melampirkan surat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor T/PK.KPPIP/35/D.V.M.EKON.KPPIP/09/2025 tanggal 8 September 2025;
5. Ketua Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan surat tanggal 16 September 2025 dan tanggal 29 September 2025, mengajukan permohonan permintaan narasumber kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Pusat Riset Teknologi Proses, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

6. Kepala SKK Migas kepada Menteri Kehutanan u.p Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan surat Nomor SRT-0568/SKKIA0000/2025/S9 tanggal 1 Oktober 2025, pada intinya menyampaikan bahwa Kepala SKK Migas dengan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengajukan Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta fasilitas pendukung untuk PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam rangka mendukung Ketahanan Energi seluas $\pm 664,1$ Ha (enam ratus enam puluh empat dan satu persepuluh) atas nama SKK Migas - Inpex Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, serta pernyataan komitmen;
7. telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 21 Oktober 2025 oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sesuai dengan Undangan Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor UN.171/RPH/TU-RPH/PLA.03.03/B/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025, dengan hasil sebagai berikut:
 - a) berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Penelitian Terpadu Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk Menteri;

- b) permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kawasan Industri OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam Beserta Fasilitas Pendukung PSN Lapangan Abadi seluas $\pm$ 664,1 Ha (enam ratus enam puluh empat dan satu persepuluh) atas nama SKK Migas – Inpex Masela Ltd. di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu dan Tim Terpadu telah melaksanakan penelitian lapangan serta pembahasan laporan Tim Terpadu;
- c) Kepala SKK Migas kepada Menteri Kehutanan u.p Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui surat Nomor SRT-0568/SKKIA0000/2025/S9 tanggal 1 Oktober 2025 menyampaikan Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta fasilitas pendukungnya untuk PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam rangka Ketahanan Energi seluas $\pm$ 664,1 (enam ratus enam puluh empat dan satu persepuluh) atas nama SKK Migas - Inpex Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
- d) akan dilakukan perubahan jenis kegiatan pada Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai surat Kepala SKK Migas kepada Menteri Kehutanan u.p. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SRT-0568/SKKIA0000/2025/S9 tanggal 1 Oktober 2025 sehingga perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Pembentukan Tim Terpadu;
- e) perlu surat penegasan / penguatan terkait nomenklatur Ketahanan Energi pada PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor 10595 Tahun 2025 tanggal 5 November 2025, telah ditetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4280 Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare) untuk Pembangunan Kawasan Industri *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Lapangan Abadi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;
9. permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta fasilitas pendukung untuk PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka mendukung Ketahanan Energi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, telah mendapatkan penegasan nomenklatur Ketahanan Energi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai surat Nomor B-9767/MG.04/DJM/2025 tanggal 10 November 2025 dan Kepala Pusat Riset Teknologi Proses, Badan Riset Inovasi Nasional sesuai surat Nomor B-7881/III.3.11/HM.00.00/11/2025 tanggal 14 November 2025;
10. Tim Terpadu telah melaksanakan penelitian secara *desk analysis* pada tanggal 20 November 2025 sampai dengan 23 November 2025 dengan hasil dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a) areal yang dimohon:

- 1) berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.118/MENHUT-PLA/PKH/PLA.04/3/2025 tanggal 20 Maret 2025, seluruhnya tumpang tindih dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan Survei Geofisik dan Geoteknikal Darat (*Onshore*) oleh SKK Migas - Inpex Masela Ltd.;
 - 2) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III, tumpang tindih dengan Indikatif PPTPKH seluas ± 109 Ha (seratus sembilan hektare); dan
 - 3) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial / PIAPS (Revisi IX), tumpang tindih dengan indikatif Areal Perhutanan Sosial seluas $\pm 0,68$ Ha (enam puluh delapan perseratus hektare) serta berada dalam wilayah KPHP Unit XVIII Maluku Tenggara Barat;
- b) berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya, serta hukum dan kelembagaan, Tim Terpadu merekomendasikan kawasan HPK seluas ± 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare) dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan perubahan atas Peta Indikatif PPTPKH sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 2)

dan PIAPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 3), serta pencabutan PPKH sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1).

c) SKK Migas wajib menyampaikan komitmen dalam bentuk akta notariil bahwa akan mempertahankan tutupan mangrove, dan tutupan hutan sekunder yang tidak digunakan untuk pembangunan akan tetap dipertahankan sebagai *buffer zone*;

11. hasil dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) telah dilaporkan kepada Menteri Kehutanan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor ND.702/PLA/RPH/PLA.03.03/B/12/2025 tanggal 19 Desember 2025, dengan arahan Bapak Menteri: "Dapat Disetujui; Tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan".

12. areal yang direkomendasikan Tim Terpadu yang berada pada Peta Indikatif PPTPKH sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) huruf a) angka 2):

a) berdasarkan ketentuan Amar KEENAM Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi III, bahwa kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk proyek prioritas Pemerintahan Pusat dan kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yang berada di dalam areal Peta Indikatif PPTPKH Revisi III dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) berdasarkan pertimbangan Gubernur Maluku sesuai surat Nomor 100.3.8/1410 tanggal 25 Juni 2024 hal Pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan bahwa mengingat pembangunan OLNG / Kilang

Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela merupakan PSN maka telah diberikan pertimbangan untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama Ketua Kelompok Kerja *One Door Service Policy* SKK-Migas – Inpex Masela Ltd.;

- c) Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dengan surat Nomor SRT-0400/SKKIH0000/2025/S9 tanggal 11 Desember 2025 menyampaikan Pernyataan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 500.1.4/327/Pyt/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyatakan bahwa areal seluas ± 109 Ha (seratus sembilan hektare) yang berada pada areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung untuk PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama SKK Migas - Inpex Masela Ltd. tidak akan diusulkan sebagai Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - d) memperhatikan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf c), areal yang berada pada indikatif PTPKH dengan kriteria Pencadangan HPK Tidak Produktif untuk dilakukan revisi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.555/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang Pencadangan Kawasan HPK Tidak Produktif untuk Sumber TORA di Provinsi Maluku dan selanjutnya perubahan atas Peta Indikatif PTPKH;
13. areal yang direkomendasikan Tim Terpadu yang berada pada Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) huruf a) angka 3) dengan kriteria

Perhutanan Sosial telah dilakukan revisi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor 11831 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025, sehingga areal yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu tidak berada dalam PIAPS;

14. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dengan surat Nomor SRT-0400/ SKKIH0000/2025/S9 tanggal 11 Desember 2025 menyampaikan pernyataan komitmen berupa Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 3 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ervinia Ida Wahyuni Adam, S.H., M.Kn., yang menyatakan bahwa SKK Migas berkomitmen untuk mempertahankan tutupan mangrove dan tutupan hutan sekunder yang tidak digunakan untuk pembangunan yang terletak pada areal hutan yang disetujui untuk dilepaskan agar tetap dipertahankan sebagai *buffer zone* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:
 - a) Pasal 58 ayat (5), Pelepasan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Kawasan Hutan Produksi Tetap dilakukan setelah Penelitian Terpadu; dan
 - b) Pasal 62 ayat (3) huruf a, berdasarkan penelitian persyaratan dan rekomendasi, Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang dimohon;
 2. Pasal 286 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025:

- a) ayat (1), berdasarkan persetujuan Menteri atas laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal;
- b) ayat (2), Sekretaris Jenderal sejak menerima telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri;
- c) ayat (3), Menteri setelah menerima konsep Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seluas ± 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029;
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Memperhatikan: Risalah Pengolahan Data Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja

Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor ND.10/PLA/RPH/PLA.03.03/B/01/2026 tanggal 5 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN *ONSHORE LIQUIFIED NATURAL GAS* (OLNG)/ KILANG PENCAIRAN GAS ALAM BESERTA FASILITAS PENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL PENGEMBANGAN LAPANGAN ABADI WILAYAH KERJA MASELA DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI ATAS NAMA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) SELUAS ± 662 HA (ENAM RATUS ENAM PULUH DUA HEKTARE) DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, PROVINSI MALUKU.

KESATU : Memberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku seluas ± 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare) sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Luas dan letak definitif kawasan HPK yang dilepaskan untuk Pembangunan OLNG / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas di lapangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan HPK yang dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal pada kawasan HPK yang dilepaskan terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat dan / atau hak-hak pihak ketiga, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib:
- a. menyelesaikan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan tata batas areal pelepasan kawasan hutan;
 - c. menyelesaikan pelunasan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengamankan kawasan hutan yang dilepaskan;
 - e. mempertahankan tutupan mangrove dan tutupan hutan sekunder yang tidak digunakan untuk pembangunan dan akan tetap dipertahankan sebagai *buffer zone*;

- f. melakukan rehabilitasi pada area *buffer zone* dan sekitarnya dengan spesies lokal yang adaptif untuk memulihkan fungsi ekologis;
- g. menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan merehabilitasi kawasan mangrove setelah jalan menuju jetty selesai digunakan;
- h. dalam pembangunan akses jalan harus menerapkan prinsip ramah lingkungan, termasuk pendekatan *elevated causeway* dan *cross culvert* pada area mangrove;
- i. menyelesaikan perizinan bidang usaha sesuai dengan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri;
- j. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan;
- l. menunjuk Lembaga Independen untuk memantau kegiatan pembukaan kawasan hutan yang dilepaskan, sebagai tindakan preventif pembakaran sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan dan siap diaudit atas sarana dan prasarana pengendalian kebakaran oleh Lembaga Independen yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi yang menangani pengendalian kebakaran;
- m. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kawasan hutan yang dimohon sesuai dokumen lingkungan hidup yang dimiliki;
- n. membangun sistem informasi kepada publik atas kegiatan Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas* (OLNG) / Kilang Pencairan Gas Alam beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf b, maka Keputusan ini dibatalkan dan kawasan HPK yang dilepaskan tetap menjadi kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. membuka lahan dengan cara membakar lahan.

KEDELAPAN : Dalam hal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan / atau melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Kawasan HPK yang telah dilepaskan dan setelah dilakukan tata batas sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf b serta telah ditetapkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan, wajib dilaksanakan pengurusan titel hak.

KESEPULUH : Kawasan HPK yang telah dilepaskan dan setelah dilakukan tata batas sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA huruf b serta telah ditetapkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan, pengurusan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Gubernur Maluku;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
15. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
17. Bupati Kepulauan Tanimbar;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
19. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI;
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX;
21. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,





INPEX

LAMPIRAN 3C RKKPR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR: pf-01 / 198 - 200 / II / 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, atas permohonan pelaku usaha, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : INPEX Masela, Ltd. |
| 2. NPWP | : 0018636571081000 |
| 3. Alamat Kantor | : Sentral Senayan 1, 13 th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, Indonesia |
| 4. Nomor Telepon | : 021-29700100 |
| 5. E-mail | : jkt.msl.perizinan@inpex.co.jp |
| 6. Sumber Pendanaan | : Swasta |
| 7. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 06201 |
| 8. Judul KBLI | : Pertambangan Gas Alam |
| 9. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 10. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : - |
| b. Desa/Kelurahan | : Lermatang |
| c. Kecamatan | : Tanimbar Selatan |
| d. Kabupaten | : Kepulauan Tanimbar |
| e. Provinsi | : Maluku |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Ada |
| 11. Luas tanah yang dimohon | : 711,95 ha |
| 12. Dokumen prastudi kelayakan | : Ada |
| 13. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan | : Ada |

dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan ketentuan:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang Disetujui | : Terlampir |
| 2. Luas tanah yang Disetujui | : 711,95 ha |
| 3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang | : - |
| 4. Kode KBLI | : 06201 |
| 5. Judul KBLI | : Pertambangan Gas Alam |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 50% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 2,0 |

4

8. Indikasi Program Utama : -
9. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan : a. pelaksanaan rencana kegiatan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah Penetapan Areal Kerja dan hanya dilakukan pada Areal Penggunaan Lain atau dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan energi, serta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan;
- c. terhadap rencana relokasi jalan kabupaten, perlu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- d. sebelum dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan ruang pada pulau-pulau kecil wajib mengurus izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. memperhatikan batasan luasan pemanfaatan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 30% (tiga puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas pulau;
- f. tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dengan sekitar lokasi kegiatan, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pengembangan ruang terbuka hijau dan zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) terhadap wilayah sekitarnya;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber air baku/air bersih yang tidak mengganggu ketersediaan air baku/air bersih di lingkungan sekitarnya;
- i. menyediakan sistem drainase serta sistem pengolahan air limbah dan udara yang memenuhi baku mutu air limbah dan udara;
- j. pada Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi berlaku ketentuan khusus

sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang;

- k. pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang;
- l. pada Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang;
- m. pada kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan (WIUP-Pencadangan) dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerjasama/sewa-menyewa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan;
- n. memperhatikan dan melakukan kerja sama dengan pihak lain pengguna lahan pemegang izin pemanfaatan ruang yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- o. tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan; dan
- p. tidak boleh mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.

10. Informasi tambahan (dalam hal tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : 0,5
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 30%
- d. Koefisien Tapak *Basement* maksimum : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 136, Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 139.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran

- Daftar Proyek Strategis Nasional romawi I huruf J Sektor Energi angka 187 meliputi Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional romawi I huruf J Sektor Energi angka 199 meliputi Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48; Pasal 49 ayat (3); Pasal 50; Pasal 51; Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 70, dan Pasal 73 ayat (2).
 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020.
 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 7 Januari 2026 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG)*/Kilang Pencairan Gas Alam Beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seluas ±662 ha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
 7. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-476/MG.04/DJM/2026 Tanggal 19 Januari 2026 perihal Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela atas nama INPEX Masela, Ltd..
 8. Surat Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor T/PK.KPPIP/35/D.V.M.EKON.KPPIP/09/2025 Tanggal 8 September 2025 hal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela.
 9. Pertimbangan Tenis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 1/2026 Tanggal 29 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 10. Pertimbangan Tenis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 2/2026 Tanggal 29 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 11. Berita Acara Diskusi Pemahaman Proses Bisnis Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 19/BA-200.11.PF.01/I/2026 Tanggal 20 Januari 2026 yang disepakati oleh Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kepala Subdirektorat Pengukuhan Wilayah I atas nama Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Kepala Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atas nama Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
 12. Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil Nomor 22/BA-200.11.PF.01/I/2026 Tanggal 22 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Sinkronisasi dan Pemanfaatan Ruang dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir.

Ketentuan lainnya:

1. RKKPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. RKKPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pemohon RKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, RKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal pemohon RKKPR belum menguasai/memiliki tanah untuk kegiatannya, pemegang RKKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan KKPR.
5. Dalam hal masa berlaku RKKPR telah habis dan proses perolehan tanah belum selesai, KKPR diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku RKKPR mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon RKKPR telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku RKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam RKKPR.
8. Pemegang RKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
9. RKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemegang RKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.

Diterbitkan tanggal: 6/2/2026

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,



Situs Windayana

NIP 196706171993031001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Gubernur Maluku;
4. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Bupati Kepulauan Tanimbar;

5. Bupati Kepulauan Tanimbar;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

LAMPIRAN I
REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR: PF-01 / 198 - 200 / II / 2026

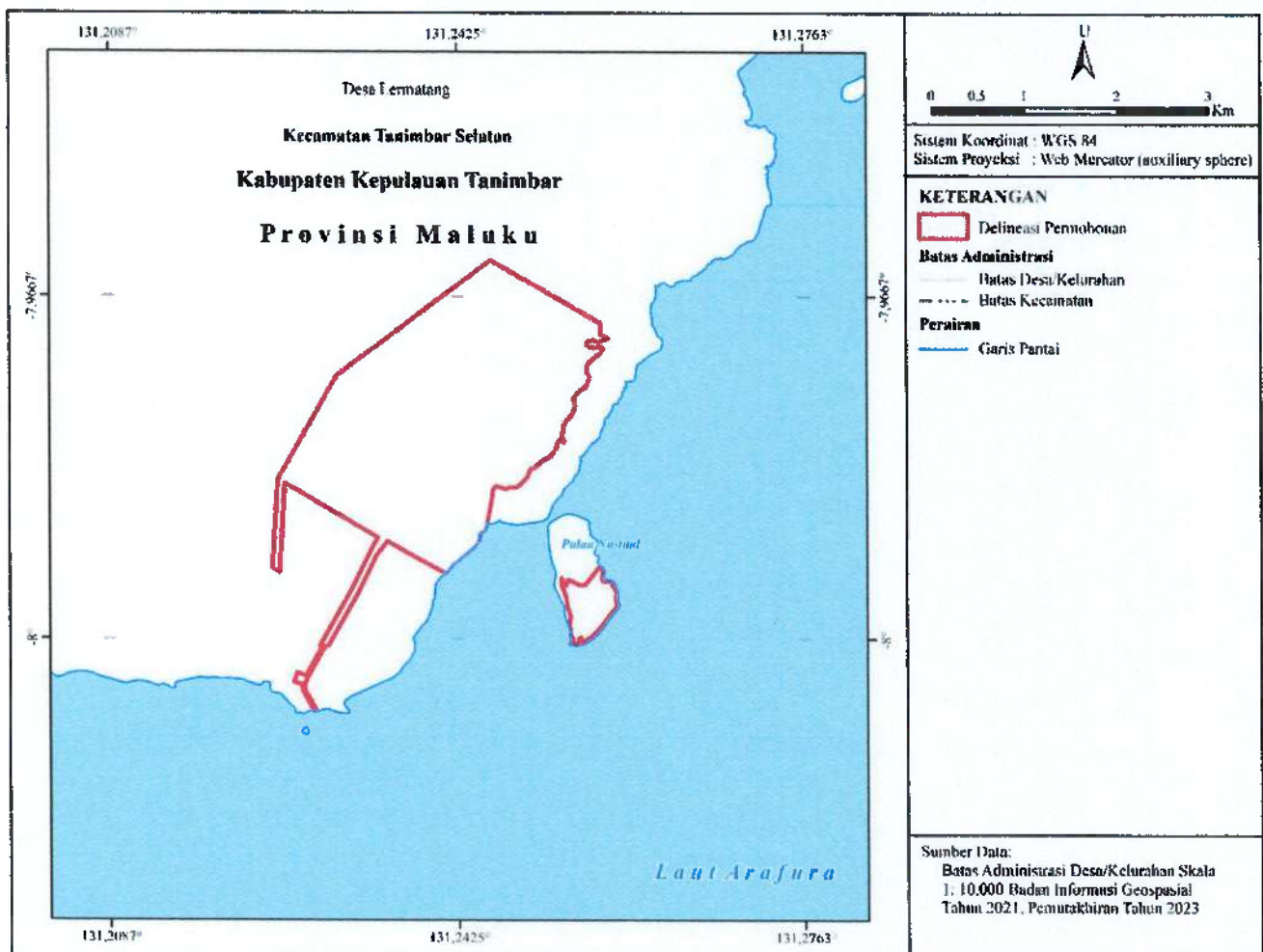
Peta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela
atas nama INPEX Masela, Ltd.

RKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional dinyatakan **disetujui seluruhnya** dengan pertimbangan:

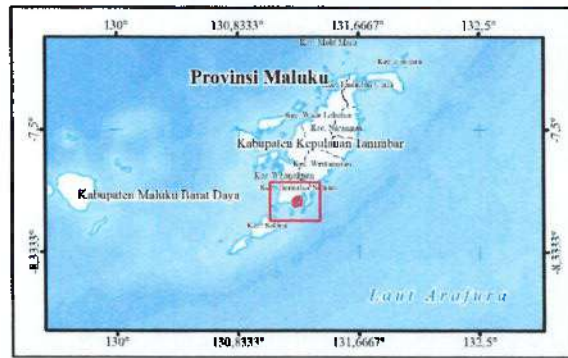
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 136, Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 139.
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Daftar Proyek Strategis Nasional romawi I huruf J Sektor Energi angka 187 meliputi Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional romawi I huruf J Sektor Energi angka 199 meliputi Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48; Pasal 49 ayat (3); Pasal 50; Pasal 51; Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 70, dan Pasal 73 ayat (2).
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 7 Januari 2026 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG)*/Kilang Pencairan Gas Alam Beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seluas ±662 ha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
7. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-476/MG.04/DJM/2026 Tanggal 19 Januari 2026 perihal Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela atas nama INPEX Masela, Ltd..
8. Surat Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor T/PK.KPPIP/35/D.V.M.EKON.KPPIP/09/2025 Tanggal 8 September 2025 hal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela.

9. Pertimbangan Tenis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 1/2026 Tanggal 29 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
10. Pertimbangan Tenis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 2/2026 Tanggal 29 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
11. Berita Acara Diskusi Pemahaman Proses Bisnis Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 19/BA-200.11.PF.01/I/2026 Tanggal 20 Januari 2026 yang disepakati oleh Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kepala Subdirektorat Pengukuhan Wilayah I atas nama Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Kepala Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atas nama Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
12. Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil Nomor 22/BA-200.11.PF.01/I/2026 Tanggal 22 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Direktur Sinkronisasi dan Pemanfaatan Ruang dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir.

Delineasi Permohonan KKPR



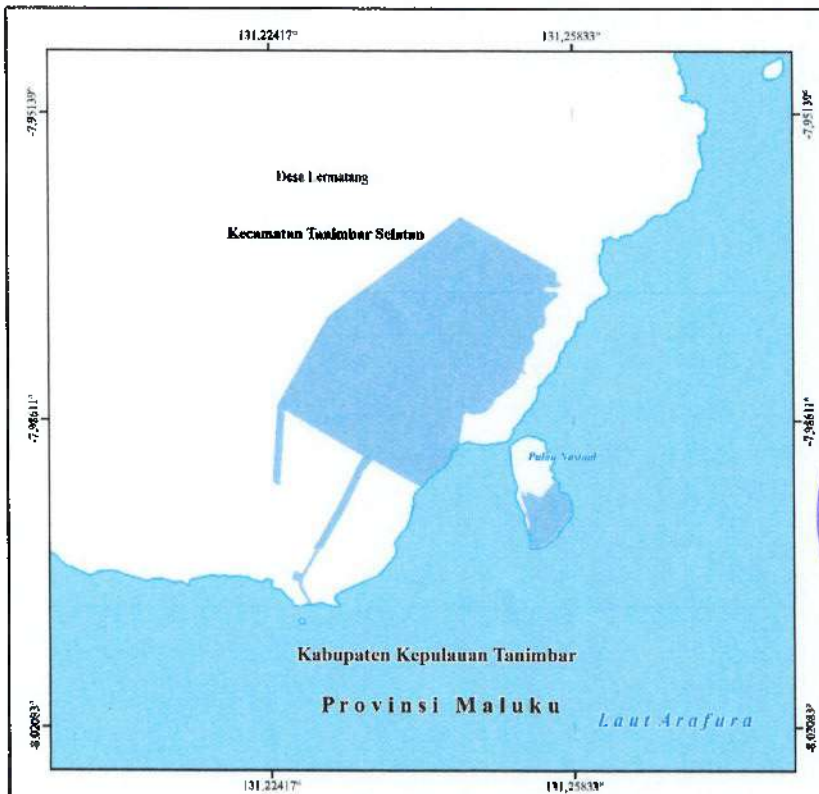
Keterangan Letak Peta



Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

Koordinat yang disetujui pada Lampiran II

Delineasi Peta Persetujuan KKPR



	KETERANGAN Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (MG) Merah Administrasi Batas Desa/Kelurahan Batas Kecamatan Peralatan Garis Pantai
Sistem Koordinat : WGS 84 Sistem Proyeksi : Web Mercator (auxiliary sphere)	Sumber data: 1. Data Administrasi Desa/Kelurahan Skala 1: 10.000 Badan Informasi Geospasial Tahun 2021. Pemutakhirkan Tahun 2023 2. Hasil Analisa, 2023

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang,



Suyus Windayana
NIP 196706171993031001

Keterangan lain yang dianggap perlu

1. Sistem proyeksi yang digunakan untuk perhitungan luas adalah sistem proyeksi *Web Mercator (Auxiliary Sphere)*.
2. Pada saat diterbitkannya KKPR ini dan dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, lokasi kegiatan berada pada Areal Penggunaan Lain.
3. Dalam hal pelepasan kawasan hutan atau perubahan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain dibatalkan, KKPR ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Terhadap lokasi permohonan yang berada di Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020 telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2026 Tanggal 7 Januari 2026 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG)*/Kilang Pencairan Gas Alam Beserta Fasilitas Pendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seluas ±662 ha di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
5. Penunjukan INPEX Masela, Ltd. sebagai pelaksana kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela, salah satunya tertuang dalam Amandemen Ketiga terhadap Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan INPEX Masela, Ltd. dan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited Wilayah Kerja Blok Masela Tanggal 10 Oktober 2019.
6. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (MG), yaitu:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum adalah 50%;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum adalah 2,0;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum adalah 30%; dan
 - d. Garis Sempadan Bangunan minimum maksimum 0,5.
7. Dalam hal informasi dokumen rencana pengadaan tanah belum dimiliki oleh penerbit KKPR, pemegang KKPR wajib menyampaikan informasi dokumen rencana pengadaan tanah untuk kepentingan perpanjangan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. KKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan.
9. KKPR ini bukan merupakan pemutihan atas bangunan atau kegiatan yang telah terbangun sebelumnya, sehingga segala bentuk kegiatan dan/atau bangunan yang telah ada sebelum KKPR ini diterbitkan menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.
10. Penyalahgunaan KKPR menjadi tanggung jawab penuh pemegang KKPR.

REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL
NOMOR: N-SP/198-200/II/2026

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y
1	131,256623	-7,994392	38	131,253348	-8,000503	75	131,254627	-7,994776
2	131,256894	-7,994472	39	131,253328	-8,000490	76	131,254834	-7,994764
3	131,257070	-7,994425	40	131,253333	-8,000439	77	131,255094	-7,994444
4	131,257184	-7,994394	41	131,253461	-8,000288	78	131,255100	-7,994437
5	131,257192	-7,994392	42	131,253620	-8,000034	79	131,255584	-7,993843
6	131,257257	-7,994374	43	131,253559	-7,999839	80	131,255741	-7,993649
7	131,257290	-7,994402	44	131,253443	-7,999706	81	131,255792	-7,993587
8	131,257292	-7,994403	45	131,253432	-7,999671	82	131,256102	-7,993205
9	131,257488	-7,994565	46	131,253425	-7,999441	83	131,256239	-7,993037
10	131,257508	-7,994842	47	131,253419	-7,999245	84	131,256410	-7,993200
11	131,257647	-7,994892	48	131,253412	-7,999021	85	131,256642	-7,993211
12	131,257649	-7,994893	49	131,253209	-7,998686	86	131,256583	-7,993524
13	131,257650	-7,994896	50	131,253315	-7,998503	87	131,256583	-7,993524
14	131,257956	-7,995574	51	131,253315	-7,998311	88	131,256555	-7,993671
15	131,257958	-7,995577	52	131,253449	-7,997866	89	131,256534	-7,993825
16	131,257957	-7,995580	53	131,253358	-7,997599	90	131,256499	-7,994077
17	131,257819	-7,996103	54	131,253169	-7,997049	91	131,256491	-7,994131
18	131,257860	-7,996262	55	131,253107	-7,996866	92	131,256610	-7,994386
19	131,258004	-7,996824	56	131,253033	-7,996302	93	131,256611	-7,994388
20	131,257837	-7,997013	57	131,252981	-7,995966	94	131,256623	-7,994392
21	131,257466	-7,997434	58	131,252961	-7,995912	95	131,254173	-8,000025
22	131,256309	-7,998937	59	131,252887	-7,995721	96	131,254346	-8,000088
23	131,255413	-7,999827	60	131,252697	-7,995228	97	131,254454	-7,999957
24	131,255385	-7,999854	61	131,252651	-7,995109	98	131,254471	-7,999889
25	131,255333	-7,999879	62	131,252529	-7,994792	99	131,254390	-7,999849
26	131,254665	-8,000199	63	131,252524	-7,994080	100	131,254173	-8,000025
27	131,254266	-8,000514	64	131,252668	-7,994356	101	131,254161	-7,967937
28	131,254257	-8,000522	65	131,252857	-7,994721	102	131,256006	-7,968986
29	131,254241	-8,000511	66	131,252881	-7,994766	103	131,256006	-7,968980
30	131,253991	-8,000354	67	131,252928	-7,994859	104	131,256052	-7,969010
31	131,253855	-8,000426	68	131,253086	-7,994507	105	131,256082	-7,969029
32	131,253710	-8,000247	69	131,253194	-7,994265	106	131,256112	-7,969046
33	131,253529	-8,000359	70	131,253239	-7,994286	107	131,256172	-7,969080
34	131,253608	-8,000465	71	131,253739	-7,994516	108	131,256175	-7,969082
35	131,253613	-8,000472	72	131,254255	-7,994754	109	131,256429	-7,969226
36	131,253577	-8,000487	73	131,254338	-7,994792	110	131,256474	-7,970293
37	131,253437	-8,000545	74	131,254599	-7,994777	111	131,256615	-7,970373

No	X	Y
112	131,257076	-7,970635
113	131,257185	-7,970697
114	131,257143	-7,970726
115	131,256926	-7,970793
116	131,256910	-7,970797
117	131,256779	-7,970829
118	131,256606	-7,970895
119	131,256576	-7,970905
120	131,256566	-7,970910
121	131,256378	-7,971002
122	131,256348	-7,971017
123	131,256211	-7,971007
124	131,256171	-7,970997
125	131,256085	-7,970977
126	131,256040	-7,970972
127	131,256007	-7,970961
128	131,255999	-7,970958
129	131,255822	-7,970893
130	131,255787	-7,970888
131	131,255767	-7,970883
132	131,255681	-7,970878
133	131,255651	-7,970883
134	131,255494	-7,970894
135	131,255333	-7,970895
136	131,255091	-7,971076
137	131,255081	-7,971086
138	131,255101	-7,971300
139	131,255116	-7,971320
140	131,255126	-7,971330
141	131,255362	-7,971515
142	131,255382	-7,971530
143	131,255423	-7,971535
144	131,255441	-7,971536
145	131,255677	-7,971561
146	131,255796	-7,971574
147	131,255817	-7,971569
148	131,255827	-7,971569
149	131,255867	-7,971559
150	131,255887	-7,971554
151	131,256140	-7,971513
152	131,256150	-7,971513
153	131,256172	-7,971513
154	131,256186	-7,971513

No	X	Y
155	131,256221	-7,971518
156	131,256231	-7,971518
157	131,256257	-7,971518
158	131,256282	-7,971518
159	131,256581	-7,971578
160	131,256601	-7,971583
161	131,256611	-7,971588
162	131,256672	-7,971783
163	131,256606	-7,971954
164	131,256596	-7,971979
165	131,256469	-7,972145
166	131,256281	-7,972323
167	131,255972	-7,972469
168	131,255956	-7,972479
169	131,255707	-7,972704
170	131,255667	-7,972734
171	131,255438	-7,972970
172	131,255412	-7,972995
173	131,255219	-7,973261
174	131,255208	-7,973281
175	131,255188	-7,973316
176	131,255168	-7,973346
177	131,255162	-7,973366
178	131,255086	-7,973603
179	131,255081	-7,973613
180	131,255076	-7,973674
181	131,255076	-7,973694
182	131,255081	-7,973729
183	131,255141	-7,974016
184	131,255180	-7,974102
185	131,255264	-7,974236
186	131,255300	-7,974294
187	131,255312	-7,974322
188	131,255315	-7,974329
189	131,255315	-7,974354
190	131,255315	-7,974364
191	131,255306	-7,974482
192	131,255295	-7,974616
193	131,255269	-7,974720
194	131,255240	-7,974832
195	131,255164	-7,975008
196	131,255088	-7,975254
197	131,255003	-7,975461

No	X	Y
198	131,254887	-7,975430
199	131,254800	-7,975536
200	131,254648	-7,975646
201	131,254406	-7,975836
202	131,254381	-7,975861
203	131,254177	-7,976012
204	131,254162	-7,976027
205	131,254137	-7,976047
206	131,253985	-7,976243
207	131,253808	-7,976479
208	131,253787	-7,976509
209	131,253804	-7,976755
210	131,253809	-7,976765
211	131,253896	-7,977002
212	131,253901	-7,977017
213	131,253901	-7,977032
214	131,253962	-7,977229
215	131,253972	-7,977264
216	131,253911	-7,977441
217	131,253820	-7,977688
218	131,253708	-7,977885
219	131,253617	-7,978103
220	131,253316	-7,978461
221	131,253086	-7,978704
222	131,252918	-7,978886
223	131,252859	-7,979066
224	131,252803	-7,979173
225	131,252788	-7,979289
226	131,252818	-7,979461
227	131,252839	-7,979694
228	131,252803	-7,979790
229	131,252696	-7,979916
230	131,252650	-7,980117
231	131,252716	-7,980274
232	131,252844	-7,980500
233	131,252910	-7,980571
234	131,252900	-7,980722
235	131,252655	-7,980702
236	131,252511	-7,980550
237	131,252435	-7,980566
238	131,252404	-7,980581
239	131,252287	-7,980749
240	131,252256	-7,980784

No	X	Y
241	131,252223	-7,980919
242	131,252190	-7,981047
243	131,252135	-7,981223
244	131,252008	-7,981464
245	131,251891	-7,981665
246	131,251825	-7,981811
247	131,251648	-7,982022
248	131,251380	-7,982232
249	131,251172	-7,982393
250	131,251030	-7,982458
251	131,250994	-7,982478
252	131,250847	-7,982548
253	131,250826	-7,982558
254	131,250673	-7,982664
255	131,250653	-7,982679
256	131,250627	-7,982704
257	131,250601	-7,982724
258	131,250473	-7,982830
259	131,250453	-7,982850
260	131,250437	-7,982871
261	131,250422	-7,982891
262	131,250252	-7,983093
263	131,250246	-7,983100
264	131,250231	-7,983118
265	131,250083	-7,983232
266	131,249961	-7,983325
267	131,249935	-7,983345
268	131,249680	-7,983340
269	131,249545	-7,983479
270	131,249464	-7,983692
271	131,249387	-7,983935
272	131,249377	-7,983945
273	131,249290	-7,984152
274	131,249153	-7,984329
275	131,249133	-7,984344
276	131,248971	-7,984535
277	131,248946	-7,984551
278	131,248773	-7,984736
279	131,248748	-7,984761
280	131,248728	-7,984781
281	131,248505	-7,985017
282	131,248495	-7,985037
283	131,248494	-7,985037

No	X	Y
284	131,248190	-7,985198
285	131,248114	-7,985238
286	131,247750	-7,985268
287	131,247740	-7,985253
288	131,247426	-7,985247
289	131,247416	-7,985253
290	131,247295	-7,985346
291	131,247258	-7,985374
292	131,247250	-7,985380
293	131,247238	-7,985390
294	131,247207	-7,985410
295	131,247095	-7,985395
296	131,247018	-7,985375
297	131,246978	-7,985369
298	131,246927	-7,985349
299	131,246917	-7,985344
300	131,246904	-7,985338
301	131,246733	-7,985257
302	131,246708	-7,985249
303	131,246702	-7,985247
304	131,246676	-7,985242
305	131,246647	-7,985232
306	131,246529	-7,985192
307	131,246305	-7,985101
308	131,246108	-7,985209
309	131,246078	-7,985240
310	131,246068	-7,985250
311	131,246026	-7,985325
312	131,245915	-7,985521
313	131,245893	-7,985795
314	131,245881	-7,985949
315	131,245881	-7,985964
316	131,245863	-7,986111
317	131,245862	-7,986120
318	131,245830	-7,986344
319	131,245829	-7,986345
320	131,245823	-7,986376
321	131,245768	-7,986657
322	131,245765	-7,986671
323	131,245741	-7,986793
324	131,245716	-7,986919
325	131,245685	-7,987078
326	131,245623	-7,987390

No	X	Y
327	131,245612	-7,987446
328	131,245549	-7,987765
329	131,245527	-7,987876
330	131,245505	-7,987984
331	131,245465	-7,988189
332	131,245374	-7,988650
333	131,245413	-7,988673
334	131,245411	-7,988679
335	131,245410	-7,988685
336	131,245405	-7,988701
337	131,245400	-7,988718
338	131,245399	-7,988723
339	131,245387	-7,988765
340	131,245382	-7,988781
341	131,245378	-7,988795
342	131,245377	-7,988800
343	131,245363	-7,988849
344	131,245361	-7,988858
345	131,245276	-7,989156
346	131,245264	-7,989201
347	131,245248	-7,989233
348	131,245231	-7,989269
349	131,245205	-7,989322
350	131,245194	-7,989345
351	131,245181	-7,989373
352	131,245173	-7,989390
353	131,245140	-7,989458
354	131,245126	-7,989486
355	131,245121	-7,989496
356	131,245121	-7,989496
357	131,245121	-7,989497
358	131,245121	-7,989497
359	131,245119	-7,989500
360	131,245119	-7,989502
361	131,245118	-7,989504
362	131,245117	-7,989505
363	131,245105	-7,989514
364	131,245095	-7,989523
365	131,245091	-7,989526
366	131,245062	-7,989549
367	131,245062	-7,989550
368	131,245056	-7,989554
369	131,245038	-7,989569

No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y
370	131,245033	-7,989573	413	131,244604	-7,990277	456	131,243550	-7,991601
371	131,245032	-7,989573	414	131,244604	-7,990277	457	131,243546	-7,991605
372	131,245032	-7,989574	415	131,244604	-7,990278	458	131,243524	-7,991622
373	131,245031	-7,989574	416	131,244603	-7,990280	459	131,243523	-7,991623
374	131,245029	-7,989576	417	131,244602	-7,990287	460	131,243520	-7,991626
375	131,245006	-7,989594	418	131,244601	-7,990289	461	131,243493	-7,991648
376	131,244998	-7,989601	419	131,244600	-7,990292	462	131,243491	-7,991649
377	131,244980	-7,989615	420	131,244592	-7,990326	463	131,243413	-7,991714
378	131,244969	-7,989624	421	131,244580	-7,990377	464	131,243396	-7,991729
379	131,244964	-7,989628	422	131,244579	-7,990380	465	131,243394	-7,991730
380	131,244953	-7,989637	423	131,244572	-7,990410	466	131,243384	-7,991739
381	131,244931	-7,989646	424	131,244565	-7,990442	467	131,243238	-7,991859
382	131,244894	-7,989662	425	131,244554	-7,990487	468	131,243233	-7,991864
383	131,244882	-7,989667	426	131,244532	-7,990578	469	131,243224	-7,991871
384	131,244867	-7,989673	427	131,244530	-7,990587	470	131,243220	-7,991874
385	131,244867	-7,989673	428	131,244526	-7,990603	471	131,243216	-7,991878
386	131,244852	-7,989679	429	131,244522	-7,990620	472	131,243208	-7,991884
387	131,244847	-7,989681	430	131,244518	-7,990638	473	131,243181	-7,991907
388	131,244826	-7,989690	431	131,244507	-7,990651	474	131,243134	-7,991945
389	131,244813	-7,989695	432	131,244501	-7,990658	475	131,243080	-7,991990
390	131,244732	-7,989730	433	131,244498	-7,990661	476	131,243057	-7,992009
391	131,244674	-7,989837	434	131,244495	-7,990664	477	131,243019	-7,992040
392	131,244674	-7,989839	435	131,244493	-7,990667	478	131,242996	-7,992060
393	131,244642	-7,989897	436	131,244303	-7,990887	479	131,242972	-7,992079
394	131,244642	-7,989918	437	131,244300	-7,990890	480	131,242927	-7,992117
395	131,244641	-7,989930	438	131,244030	-7,991204	481	131,242925	-7,992119
396	131,244641	-7,989942	439	131,244017	-7,991215	482	131,242922	-7,992121
397	131,244640	-7,989967	440	131,244008	-7,991222	483	131,242921	-7,992121
398	131,244637	-7,990029	441	131,243990	-7,991237	484	131,242920	-7,992123
399	131,244635	-7,990090	442	131,243975	-7,991249	485	131,242910	-7,992131
400	131,244633	-7,990135	443	131,243951	-7,991269	486	131,242908	-7,992133
401	131,244632	-7,990162	444	131,243847	-7,991356	487	131,242903	-7,992136
402	131,244631	-7,990166	445	131,243839	-7,991362	488	131,242901	-7,992138
403	131,244626	-7,990184	446	131,243836	-7,991364	489	131,242898	-7,992140
404	131,244626	-7,990187	447	131,243833	-7,991367	490	131,242885	-7,992151
405	131,244625	-7,990189	448	131,243832	-7,991368	491	131,242884	-7,992153
406	131,244625	-7,990191	449	131,243788	-7,991404	492	131,242871	-7,992163
407	131,244622	-7,990203	450	131,243787	-7,991405	493	131,242868	-7,992165
408	131,244613	-7,990239	451	131,243762	-7,991426	494	131,242865	-7,992168
409	131,244611	-7,990247	452	131,243746	-7,991438	495	131,242844	-7,992185
410	131,244606	-7,990271	453	131,243740	-7,991443	496	131,242826	-7,992200
411	131,244605	-7,990275	454	131,243565	-7,991589	497	131,242810	-7,992214
412	131,244604	-7,990276	455	131,243558	-7,991595	498	131,242807	-7,992216

No	X	Y	No	X	Y	No	X	Y
499	131,242803	-7,992219	542	131,242572	-7,992411	585	131,242327	-7,992613
500	131,242789	-7,992231	543	131,242564	-7,992418	586	131,242327	-7,992613
501	131,242787	-7,992233	544	131,242559	-7,992422	587	131,242327	-7,992613
502	131,242769	-7,992247	545	131,242546	-7,992432	588	131,242327	-7,992613
503	131,242746	-7,992267	546	131,242523	-7,992451	589	131,242327	-7,992614
504	131,242736	-7,992275	547	131,242506	-7,992465	590	131,242327	-7,992614
505	131,242721	-7,992288	548	131,242480	-7,992487	591	131,242325	-7,992615
506	131,242691	-7,992312	549	131,242475	-7,992491	592	131,242321	-7,992619
507	131,242683	-7,992319	550	131,242469	-7,992496	593	131,242319	-7,992620
508	131,242682	-7,992320	551	131,242461	-7,992502	594	131,242319	-7,992620
509	131,242680	-7,992321	552	131,242459	-7,992504	595	131,242316	-7,992623
510	131,242679	-7,992322	553	131,242455	-7,992507	596	131,242316	-7,992623
511	131,242660	-7,992338	554	131,242447	-7,992514	597	131,242315	-7,992624
512	131,242653	-7,992343	555	131,242445	-7,992516	598	131,242313	-7,992625
513	131,242651	-7,992345	556	131,242441	-7,992519	599	131,242312	-7,992626
514	131,242651	-7,992345	557	131,242436	-7,992523	600	131,242312	-7,992626
515	131,242650	-7,992346	558	131,242417	-7,992539	601	131,242311	-7,992626
516	131,242647	-7,992348	559	131,242415	-7,992541	602	131,242311	-7,992626
517	131,242647	-7,992349	560	131,242414	-7,992542	603	131,242311	-7,992626
518	131,242647	-7,992349	561	131,242412	-7,992543	604	131,242311	-7,992627
519	131,242647	-7,992349	562	131,242409	-7,992546	605	131,242311	-7,992627
520	131,242647	-7,992349	563	131,242401	-7,992552	606	131,242311	-7,992627
521	131,242647	-7,992349	564	131,242401	-7,992552	607	131,242311	-7,992627
522	131,242646	-7,992350	565	131,242399	-7,992554	608	131,242311	-7,992627
523	131,242645	-7,992350	566	131,242396	-7,992556	609	131,242310	-7,992627
524	131,242645	-7,992350	567	131,242395	-7,992557	610	131,242310	-7,992627
525	131,242645	-7,992350	568	131,242395	-7,992557	611	131,242310	-7,992627
526	131,242644	-7,992351	569	131,242395	-7,992557	612	131,242310	-7,992627
527	131,242643	-7,992352	570	131,242395	-7,992557	613	131,242309	-7,992629
528	131,242640	-7,992355	571	131,242393	-7,992559	614	131,242308	-7,992630
529	131,242638	-7,992356	572	131,242393	-7,992559	615	131,242307	-7,992630
530	131,242638	-7,992356	573	131,242393	-7,992559	616	131,242305	-7,992631
531	131,242637	-7,992357	574	131,242393	-7,992559	617	131,242303	-7,992633
532	131,242636	-7,992358	575	131,242393	-7,992559	618	131,242302	-7,992634
533	131,242634	-7,992359	576	131,242383	-7,992567	619	131,242300	-7,992636
534	131,242631	-7,992362	577	131,242376	-7,992573	620	131,242299	-7,992637
535	131,242621	-7,992370	578	131,242374	-7,992575	621	131,242297	-7,992638
536	131,242619	-7,992372	579	131,242354	-7,992591	622	131,242293	-7,992642
537	131,242615	-7,992375	580	131,242338	-7,992605	623	131,242286	-7,992647
538	131,242608	-7,992381	581	131,242334	-7,992608	624	131,242281	-7,992652
539	131,242601	-7,992387	582	131,242330	-7,992611	625	131,242273	-7,992658
540	131,242588	-7,992397	583	131,242328	-7,992613	626	131,242268	-7,992663
541	131,242585	-7,992400	584	131,242327	-7,992613	627	131,242263	-7,992666

No	X	Y
628	131,242262	-7,992668
629	131,242256	-7,992672
630	131,242252	-7,992676
631	131,242237	-7,992688
632	131,242235	-7,992690
633	131,242208	-7,992712
634	131,242208	-7,992712
635	131,242208	-7,992712
636	131,242207	-7,992713
637	131,242206	-7,992713
638	131,242206	-7,992713
639	131,242201	-7,992718
640	131,242201	-7,992718
641	131,242200	-7,992719
642	131,242200	-7,992719
643	131,242200	-7,992719
644	131,242200	-7,992719
645	131,242156	-7,992757
646	131,242155	-7,992757
647	131,242153	-7,992759
648	131,242151	-7,992761
649	131,242150	-7,992762
650	131,242149	-7,992763
651	131,242137	-7,992773
652	131,242130	-7,992779
653	131,242130	-7,992779
654	131,242130	-7,992779
655	131,242130	-7,992779
656	131,242129	-7,992780
657	131,242128	-7,992780
658	131,242127	-7,992781
659	131,242127	-7,992781
660	131,242127	-7,992781
661	131,242127	-7,992781
662	131,242127	-7,992781
663	131,242127	-7,992782
664	131,242125	-7,992783
665	131,242124	-7,992785
666	131,242123	-7,992785
667	131,242122	-7,992786
668	131,242120	-7,992787
669	131,242120	-7,992787
670	131,242120	-7,992787

No	X	Y
671	131,242120	-7,992787
672	131,242119	-7,992788
673	131,242118	-7,992789
674	131,242118	-7,992790
675	131,242118	-7,992790
676	131,242117	-7,992790
677	131,242108	-7,992798
678	131,242104	-7,992802
679	131,242096	-7,992808
680	131,242087	-7,992816
681	131,242066	-7,992834
682	131,242043	-7,992854
683	131,242041	-7,992856
684	131,242040	-7,992856
685	131,242039	-7,992857
686	131,242038	-7,992859
687	131,242031	-7,992866
688	131,241958	-7,992957
689	131,241957	-7,992958
690	131,241955	-7,992960
691	131,241867	-7,993069
692	131,241865	-7,993071
693	131,241828	-7,993117
694	131,241812	-7,993136
695	131,241805	-7,993145
696	131,241783	-7,993172
697	131,241774	-7,993183
698	131,241772	-7,993185
699	131,241762	-7,993198
700	131,241760	-7,993201
701	131,241756	-7,993205
702	131,241756	-7,993206
703	131,241711	-7,993261
704	131,241711	-7,993261
705	131,241710	-7,993261
706	131,241710	-7,993261
707	131,241709	-7,993263
708	131,241668	-7,993313
709	131,241646	-7,993341
710	131,241594	-7,993405
711	131,241563	-7,993443
712	131,241530	-7,993484
713	131,241494	-7,993528

No	X	Y
714	131,241482	-7,993542
715	131,241474	-7,993552
716	131,241474	-7,993553
717	131,241473	-7,993554
718	131,241472	-7,993555
719	131,241471	-7,993556
720	131,241471	-7,993556
721	131,241471	-7,993556
722	131,241471	-7,993556
723	131,241471	-7,993556
724	131,241471	-7,993556
725	131,241471	-7,993556
726	131,241470	-7,993557
727	131,241438	-7,993581
728	131,241432	-7,993585
729	131,241425	-7,993590
730	131,241424	-7,993591
731	131,241397	-7,993610
732	131,241393	-7,993613
733	131,241387	-7,993618
734	131,241367	-7,993632
735	131,241362	-7,993636
736	131,241355	-7,993642
737	131,241350	-7,993645
738	131,241345	-7,993649
739	131,241341	-7,993652
740	131,241340	-7,993652
741	131,241340	-7,993653
742	131,241340	-7,993653
743	131,241340	-7,993653
744	131,241340	-7,993653
745	131,241339	-7,993653
746	131,241339	-7,993653
747	131,241336	-7,993655
748	131,241334	-7,993657
749	131,241334	-7,993657
750	131,241332	-7,993659
751	131,241332	-7,993659
752	131,241331	-7,993659
753	131,241331	-7,993659
754	131,241328	-7,993661
755	131,241325	-7,993663
756	131,241322	-7,993665